

UPDATE

PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PILKADA 2020

**Pencalonan dan Pemutakhiran
Data Pemilih**



DEFINISI DAN TUJUAN

Segala hal yang mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang Demokratis.

Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.

Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini.

Pemetaan Kerawanan saat terjadinya pandemi Covid-19 (Bencana non alam).



DIMENSI IKP PILKADA 2020

(UPDATE PASCA COVID-19)



KONTEKS SOSIAL POLITIK

- Gangguan Keamanan (Bencana Alam Dan Bencana Sosial)
- Kekerasan Atau Intimidasi Pada Penyelenggara
- Keberpihakan Penyelenggara Pemilu
- Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Yang Bermasalah
- Ketidaknetralan ASN Penyalah Gunaan Anggaran

KONTEKS PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

- Dukungan Teknologi Informasi
- Infrastruktur Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu

KONTESTASI
September 2020

PARTISIPASI
November 2020

UPDATE
PEMETAAN KERAWANAN
PILKADA SERENTAK 2020
KABUPATEN / KOTA





KONTEKS SOSIAL

Gangguan Keamanan (Bencana Alam
Dan Bencana Sosial)

Kekerasan Atau Intimidasi Pada
Penyelenggara

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Manokwari
Selatan

Kabupaten Sleman

Kabupaten Kaimana

Kabupaten Nabire

Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Bandung

Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Lamongan

Kabupaten Halmahera Utara





KONTEKS POLITIK

Keberpihakan Penyelenggara
Pemilu

Rekrutmen Penyelenggara
Pemilu Yang Bermasalah

Ketidaknetralan ASN

Penyalahgunaan Anggaran

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kabupaten Manokwari
Selatan
Kabupaten Sijunjung
Kota Makassar
Kabupaten Lamongan
Kota Sungai Penuh

Kabupaten Mamuju
Kabupaten Klaten
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Agam





KONTEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

Dukungan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Penyelenggara

Pemilu

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kabupaten Manokwari
Selatan

Kabupaten Supiori
Kota Solok

Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Kepulauan
Meranti

Kabupaten Malinau

Kabupaten Morowali Utara

Kabupaten Mamberamo Raya

Kabupaten Agam

Kabupaten Siak

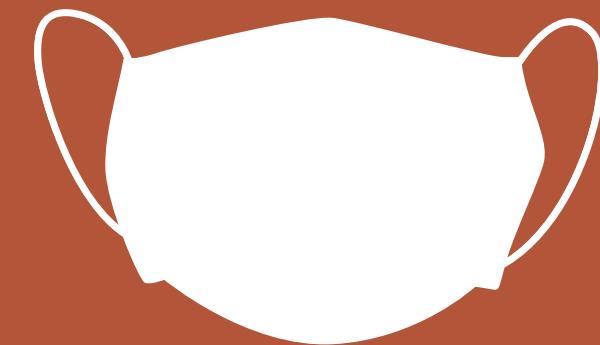
Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Kepulauan Aru

Kabupaten Kaimana





KONTEKS PANDEMI

Anggaran Pilkada terkait covid-19

Data terkait covid-19

Dukungan pemerintah daerah

Resistensi Masyarakat

Hambatan Pengawasan Pemilu

KABUPATEN/KOTA DENGAN KERAWANAN TINGGI

Kota Makassar	Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Lamongan
Kabupaten Bulungan	Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Karawang	Kota Banjarbaru
Kota Manado	Kota Ternate
Kabupaten Minahasa Utara	Kota Depok
Kota Tomohon	Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Gowa	Kota Semarang
Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Bantul
Kota Sungai Penuh	Kabupaten Melawi



UPDATE

PEMETAAN KERAWANAN
PILKADA SERENTAK 2020
PROVINSI





KONTEKS SOSIAL

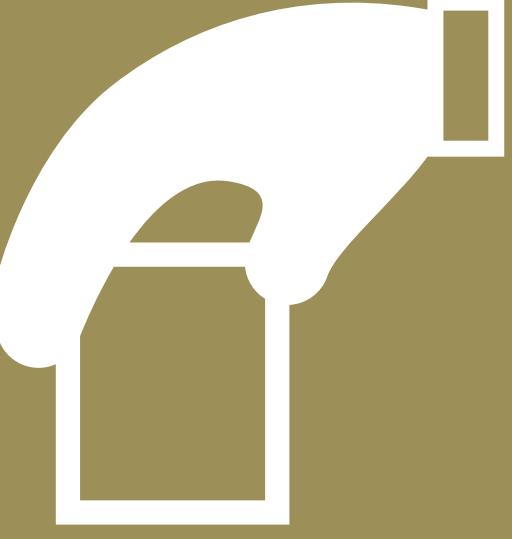
Gangguan Keamanan (Bencana Alam
Dan Bencana Sosial)

Kekerasan Atau Intimidasi Pada
Penyelenggara

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI

Sumatera Barat
Jambi
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Kepulauan Riau
Bengkulu
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah





PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI

KONTEKS POLITIK

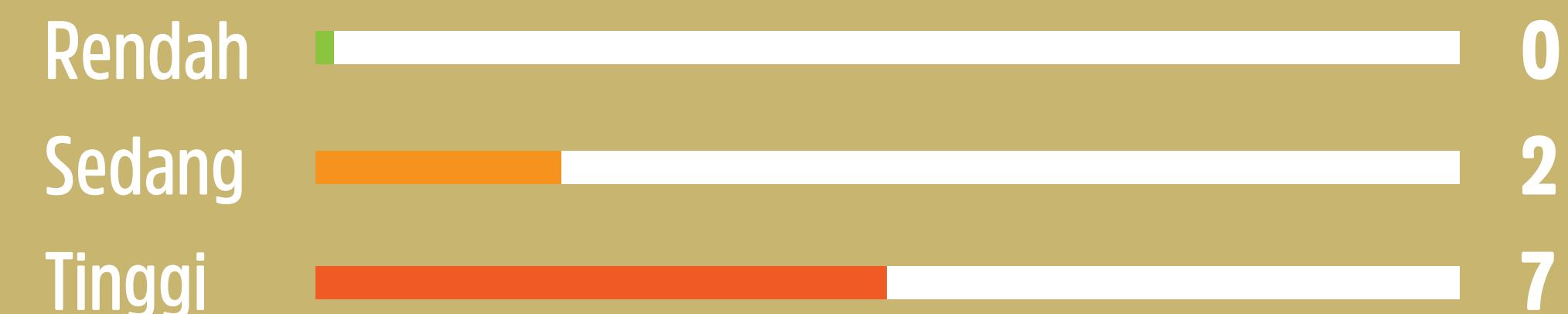
Keberpihakan Penyelenggara
Pemilu

Rekrutmen Penyelenggara
Pemilu Yang Bermasalah

Ketidaknetralan ASN

Penyalahgunaan Anggaran

Sumatera Barat
Jambi
Sulawesi Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Utara
Bengkulu
Sulawesi Tengah
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah





KONTEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

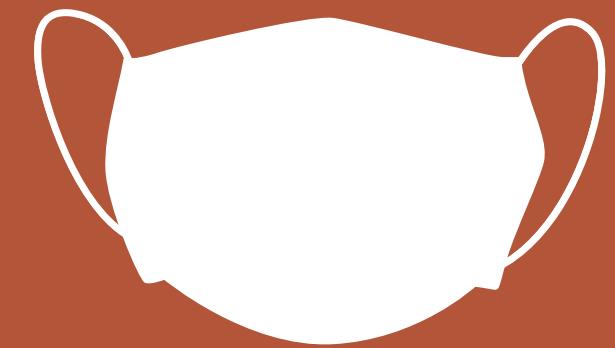
Dukungan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Penyelenggara
Pemilu

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI

Sumatera Barat	Sulawesi Utara
Kepulauan Riau	Sulawesi Tengah
Bengkulu	Jambi
Kalimantan Utara	Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan	





KONTEKS PANDEMI

Anggaran Pilkada terkait covid-19

Data terkait covid-19

Dukungan pemerintah daerah

Resistensi Masyarakat

Hambatan Pengawasan Pemilu

PROVINSI DENGAN KERAWANAN TINGGI





REKOMENDASI

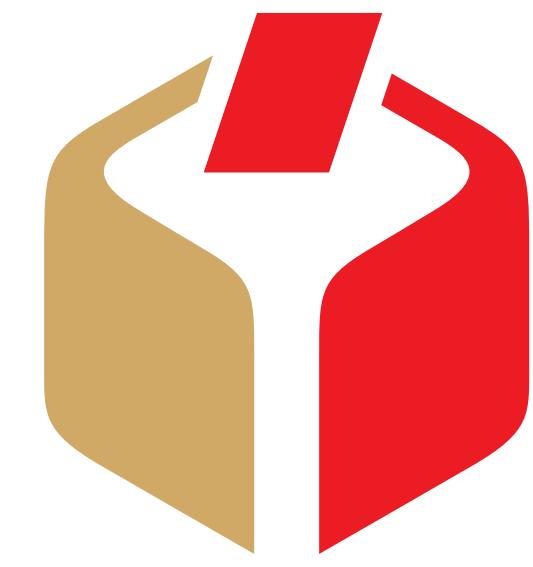
Memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran dan pemilih.

Koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemic covid-19 di masing-masing daerah.

Memastikan dukungan anggaran penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenangan dan anggaran penanggulangan covid-19

Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM